

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL
Jln. Gajah Mada No. 51 Telp. (0292) 422304
PURWODADI - 58111

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	5
	D. Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT	
	DAERAH TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	19
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
	2.4 Riveuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	26
	A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
	B. Tujuan dan Sasaran RENJA PD	26
	C. Program dan Kegiatan	26
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	32
BAB V	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD (Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan yang secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) 2022 merupakan acuan PD (Perangkat Daerah) untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA – PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan PD guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan, sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat rencana kerja (Renja) sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan sampai dengan penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja PD selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja Tahun 2022.

Selanjutnya Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran PD.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 serta sebagai perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja PD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD,
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja disusun agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat lebih terarah dan secara administratif dapat memenuhi persyaratan pertanggungjawaban serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas.

Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan terhadap rencana kerja n-2 yaitu tahun 2020 dan perkiraan capaian rencana kerja n-1 yaitu tahun 2021. Evaluasi tersebut diperlihatkan pada Tabel II.1.

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-2)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	06				<u>Urusan Sosial</u>									
					-									
1	06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	70,7	62,85	74,6	64,14	85,97	78,57		

						Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	40,9							
						Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	70,6							
1	06	01	15	06	Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin	50	-	3	2,99	99,60	124.178	116.727,32	94,00
1	06	01	15	07	Bantuan Sosial Pangan	Pemberdayaan keluarga miskin yang belum pernah mendapat bantuan	325	-	-	-	-	124.178	122.936,22	99,00
1	06	01	15	08	Pemberdayaan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kecamatan yang dimonitor	60	-	90	84	93,55	19	18,89	99,40
1	06	01	15	09	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin	Jumlah KUBE fakir miskin yang dibina dan dimonitor	60	40	400	390,20	97,55	400	398,20	99,55
1	06	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		80	80	50	49,82	99,64	75	74,77	99,69

						Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80							
						Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	70							
1	06	01	16	04	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah anak terlantar yang terlatih	150	-	-	-	-	82	82	100
1	06	01	16	14	Fasilitasi Program Keluarga Harapan Sejahtera (PKHS)	Jumlah Peserta Sosialisasi dari Program Keluarga Harapan Sejahtera	200	19	170	170	100	656	611,39	93,20
1	06	01	16	15	Pendampingan Identitas Pelayanan Sosial	Pembinaan petugas pendamping	68	19	240	239,76	99,90	75	75,00	100
1	06	01	16	19	Pembinaan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia yang dibina	180	25	180	180,00	100,00	180	180,00	100
1	06	01	16	24	Pembinaan Sosial Bagi Anak Terlantar Potensial	Jumlah anak terlantar potensial yang dibina	180	50	65	65,00	100,00	100	100,00	100

1	06	01	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,6	80	3,73	3,69	98,96	4	3,99	99,75
1	06	01	18	06	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang disabilitas	KUBE disabilitas yang dibina	50	-	20	20	100	20	20	100
1	06	01	18	07	Pembinaan dan Koordinasi Tim Advokasi Difabel	Koordinasi tim advokasi difabel	48	-	60	60	100	100	100	100
1	06	01	18	08	Pelatihan Keterampilan Bagi KUBE Difabel	Jumlah peserta pelatihan	50	15	10	10	100	5	5	100
1	06	01	19		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo									
						Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	87,5		81,25	81,25	100	82	82	100
						Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	32	32	32	32	32	32	32	32
1	06	01	19	08	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang dibina	150	-	40	40	100	50	50	100

1	06	01	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		28	80	18,79	18,79	100	19	18,80	98,94
						Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)								
1	06	01	20	06	Penjaringan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)	Jumlah PGOT yang terjaring	35	50	160	160	100	35	34,62	98,90
1	06	01	20	09	Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) dan Waria	Jumlah WTS yang mengikuti sosialisasi	28	80	50	50	100	2	2,00	99,82
1	06	01	20	10	Pembinaan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah ODHA yang dibina	31	-	30	30	100	30	30	100
1	06	01	20	14	Pembinaan Keluarga Eks Tuna Sosial	Jumlah eks psykotik dan pekerja sosial yang dibina	31	45	60	60	100	60	60	100
1	06	01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100	80	100	98,99	98,99	100	99,12	99,12

						Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	-								
1	06	01	21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisai undian berhadiah	75	-	75	75	100	100	100	100	
1	06	01	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Peserta Study Referensi	25	25	-	-	-	25	24,93	99,74	
1	06	01	21	06	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi	60	-	60	59,95	99,91	60	60	100	
1	06	01	21	10	Pemutakiran data PSKS dan PMKS	Terlaksananya Pemutakiran Data PSKS dan PMKS	196	-	280	280	100	19	17,71	93,20	
1	06	01	21	13	Fasilitasi terkait Tagana	Tagana yang mendapat Fasizlitas	3	-	75	69,83	93,10	70	69,74	99,63	
1	06	01	21	14	Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Tagana yang dibina	180	50	180	179,68	99,82	180	180	100	
1	06	01	21	16	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Eks Korban bencana	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	200	-	200	194,66	97,33	200	200	100	
1	06	01	21	18	Kegiatan Partisisipasi Masyarakat Malam Pengelolaan Budaya	Masyarakat yang ikut berpartisipasi	3	4	3	2,96	98,57	3	2,96	98,60	

1	06	01	21	19	Pemberdayaan dan Pembinaan Karang Taruna	Karang Taruna yang dibina	800	19	600	595,26	99,21	70	69,46	99,23
1	06	01	21	20	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kerjasama Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKKK dan LKKS yang dibina	50	2	30	28,00	93,33	35	34,67	99,07
1	06	01	21	21	Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TKSK yang dibina	19	19	30	29,44	98,13	19	15,83	83,30
1	06	01	21	22	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah PSM yang dibina	50	35	100	100	100	40	39,17	97,93
1	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		83	80	81	78,36	96,74	81	80,21	99,02
						AKIP, Laporan Keuangan OPD								
1	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang tertangani	12	12	12	11,71	97,56	12	12	100,00
1	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Telpon, Air/PDAM/ dan Listrik	12	5	12	9,44	78,69	12	11,36	94,68
1	06	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	2	-			-	-	-

1	06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	12	12	11,94	99,50	12	11,96	99,65
1	06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	11	12	12	100	12	12	100
1	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10	6	6	100	12	12	100
1	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	3	3	3	100	5	5	100
1	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makan dan Minum Tamu dan Pegawai Dinas Sosial	12	2	2	2	100	2	2,00	99,98
1	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	8	12	11,96	99,64	12	12,00	99,98
1	06	01	01	19	Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Ke dalam Daerah	12	3	3	2,99	99,77	1	1	100
1	06	01	01	21	Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	Terlaksananya Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	12	15	3	3,00	100	12	12,00	100
1	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80	80	70,24	69,87	99,47	71	70,96	99,94

						Cakupan Sarana dan Prasarana									
1	06	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor	3	3	2	1,98	98,94	2	2,00	99,96	
1	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Kontinyu dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	16	16	13	12,99	99,94	12	11,98	99,85	
1	06	01	02	45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Terlaksananya Perawatan Rutin/Peralatan Kantor	50	10	5	5	100	16	16	100	
1	06	01	02	46	Pemeliharaan TMP dan MP di Kabupaten Grobogan	Terlaksananya Pemeliharaan TMP dan MP	4	4	4	3,96	98,94	4	4	100	
1	06	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		90	80	90	88,95	98,83	95	94,50	99,47	
						Persentase Tingkat disiplin Aparatur									
1	06	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas	80	105	100	98,83	98,83	130	129,31	99,47	
1	06	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		74	80	71,20	71,20	100	75	75	100	
						Persentase Tingkat Disiplin Aparatur									
1	06	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Non Formal	5	22	2	2	100	2	2	100	

1	06	01	05	04	Peningktan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	50	-	-	-	-	-	-	-
1	06	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90	80	90	90	100	94	93,52	99,49
						Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur								
1	06	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan keuangan Akhir Tahun dan Terbayarnya Honorarium Operator Simda	2	2	3	3	100	3	3	100
1	06	01	06	06	Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Bagi Karyawan Dinsos	30	-	30	30	100	30	30	100
1	06	01	06	07	Pengelolaan Aset	Lancarnya Pengelolaan SIMDA	2	2	2	2	100	2	1,98	99,21

Berdasarkan Tabel II.1 tersebut bahwa ada 6 program di tahun 2020 sedangkan tahun 2021 hanya ada 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya di samping program dan kegiatan penunjang administrasi perkantoran.

Program pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Program Kedua Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 dari target rencana kerja 50 % dapat tercapai 49,82 % dalam pelaksanaan program kedua ini pada tahun 2021 dengan target 75 % dapat menyelesaikan sesuai dengan target kinerja. Perkiraan tahun 2021 dari target 75 %, diperkirakan sampai akhir tahun dapat menyelesaikan sesuai target.

Program ketiga Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya). Pada Program ini di tahun 2020 target capaian 18,79 % realisasi 18,79 %. Sedangkan pada tahun 2021 kegiatan dari program tersebut merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Sosial yang dengan target 19 % terealisasi 18,80 % .

Selanjutnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 dengan target 100 % terealisasi 99,12 % . Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 terdapat Program Penanganan Bencana .Dari program tersebut pada tahun 2021 dengan indikator persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan persentase korban bencana skala kabupaten .Target Renstra pada tahun 2020 sebesar 100 % dan dapat terealisasi 97,33 %. Pada tahun 2021 pencapaiannya diperkirakan akan dapat dicapai 100% .

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya pada tahun 2020 masih dilaksanakan karena kegiatan fakir miskin masuk dalam program tersebut Sedangkan tahun 2021 kegiatan Fakir Miskin masuk pada Program Perlindungan Jaminan Sosial . Program ini merupakan program baru sesuai Pemendagri 90 tahun 2019 yang kegiatannya mencakup pendataan dan pengelolaan fakir miskin. Pada

tahun 2020 kegiatan tersebut diatas sesuai target Renstra 74,6 % dan realisasi 64,14 % Pada tahun 2021 ini diperkirakan terealisasi 100 % dari target 78,57 % .

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan dua indikator yaitu persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan Sarana sosial seperti panti asuhan , panti jompo dan panti rehabilitasi. Untuk indikator pertama target tahun 2020 sebesar 81,25 % dapat tercapai 100%. Untuk tahun 2021 Program tersebut sudah masuk dalam Program Rehabilitasi Sosial diperkirakan dapat tercapai 100 % dari target 82 %.

Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan indikator persentase eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang telah terbina. Di tahun 2020 ditargetkan 18,79 % dapat tercapai 18,79 %. Untuk tahun 2021 target 18,80 % dan diperkirakan bisa tercapai 100 % dari target.

Program keenam Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang indikatornya persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 target kinerja 100 % dan terlaksana 98,99 % , untuk target 2021 sebesar 100 % diperkirakan akan tercapai 100% juga.

2.2.Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, maka Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan wajib Sosial.

Tabel II.2
memperlihatkan pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Target / Standar Yang Telah Ditetapkan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A.	IKU (Indikator Kinerja Utama											
1	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	100%	62,85	66,78	70,71	74,64	78,57	59,27	57,69	70,71	74,64	
	SPM.											
	Bidang Sosial											
1	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh	100%	24,2	32,5	40,9	55	72,22	23	24	30	35	

	bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar											
2	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.	80%	40	50	70,6	76,5	87,5	40	45	70	80	
3	Persentase (%) Panti Sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial	80%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	

4	Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap cepat darurat	80%	70	75	80	85	93	100	100	100	100	
5	Persentase(%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap cepat darurat.	80%	50	65	70	75	85	100	100	100	100	
6	Persentase (%) Penyandang Disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40%	3,73	4,66	5,6	6,53	7,46	7,8	5,65	11,4	7,6	

	IKK(Indikator Kinerja Kunci)											
1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi Fakir Miskin	27%			23	27	30	23	27	30		
2	Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan/Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.											
		32	32	32	32	32	32	31	32	32	32	
3	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial											
		80%	62,85	66,78	70,71	74,64	78,57	62,85	59,27	57,69	74,64	
4	Persentase Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social											
		8,76%	3,3	4,66	5,6	6,53	7,65	7,8	5,65	19,88	6,53	
5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social											
		80%	24,2	32,5	40,9	55	72,22	20	00	55	72,22	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah belum tertangani nya fakir miskin dan difabel secara keseluruhan, sesuai dengan visi misi bupati Grobogan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 belum bisa dilaksanakan karena rancangan renja ini dibuat sebagai bahan untuk pembuatan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD akan dilaksanakan pada saat pembuatan rencana kerja perangkat daerah.

Di samping review terhadap rancangan awal RKPD, dilakukan juga analisa terhadap usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan. Analisa ini dilakukan setelah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan dilaksanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional terhadap urusan Sosial adalah

- 1) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial .

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas . Sedangkan sasaran yang ingin dicapai

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

C. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dirumuskan dalam Tabel III.1 berikut ini.

TABEL III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dan Perkiraan maju Tahun 2022

OPD : DINAS SOSIAL

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.6.1					DINAS SOSIAL				4.408.096.874	0	0			6.675.000.000		
1					DINAS SOSIAL				4.408.096.874	0	0			6.675.000.000		
1	06				Urusan Sosial				4.408.096.874	0	0			6.675.000.000		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Sosial Kabupaten Grobogan		3.059.704.174	0	0			4.750.000.000		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	1 Dokumen	100.000.000	0	0		2 Dokumen	190.000.000		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Peserta Sosialisasi Pembuatan Renstra dan Renja SKPD, Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	45 orang, 1 Dokumen	55.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	60 orang, 2 Dokumen	100.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya Tenaga Honoror Operator SIMDA	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	2 orang	45.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	4 orang	90.000.000	Usulan OPD

1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Tenaga Honorer untuk Operator SIMDA	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	4 orang	1.753.097.074	0	0			8 orang	2.590.000.000	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	12 bulan	1.708.097.074	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	12 bulan	2.500.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan dan Terwujudnya Laporan Akhir Tahun	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	4 orang	45.000.000			Dana Alokasi Umum	penting	8 orang	90.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	152 orang	87.730.000	0	0	Dana Alokasi Umum		180 orang	240.000.000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	152 orang	62.730.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	180 orang	150.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksannya ASN untuk mengikuti Bintek/ Diklat ASN	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	5 orang	25.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	15 orang	90.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	12 bulan	503.200.000	0	0			12 bulan	805.000.000	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	11 item	8.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	12 item	25.000.000	Usulan OPD

1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Minum/ Harian Pegawai	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	190 dos	60.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	200 dos	150.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	37500 lembar	22.200.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	40000 lembar	75.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	4 item	8.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	6 item	25.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	65 item	120.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	70 item	180.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Sarana untuk Pendukung Pelaksanaan Tugas/ Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	12 bulan	285.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	12 bulan	350.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	8 item	49.702.450	0	0			10 item	90.000.000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	8 item	49.702.450	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	10 item	90.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor dan Terbayarnya Petugas Tenaga Kebersihan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	12 bulan	330.879.650	0	0			12 bulan	535.000.000	

1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	800 buah	8.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	900 buah	25.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Kebutuhan untuk Pembayaran Jasa Penggunaan Air PDAM, Listrik, Telpn dan Speedy	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	12 bulan	108.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	12 bulan	180.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas Sosial Kabupaten Grobogan		24.999.650	0	0	Dana Alokasi Umum	penting		90.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Tenaga Penjaga Malam, Kebersihan Kantor dan Pengemudi Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	20 orang	189.880.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	30 orang	240.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbangunnya Gedung Baru Dinas Sosial dan Terawatnya Gedung Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	2 Gedung	235.095.000	0	0			2 Gedung	300.000.000	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya Kendaraan Dinas Roda Dua dan Mobil Dinas Sebagai Sarana Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	10 unit	50.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	12 unit	100.000.000	Usulan OPD
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Sosial Kab. Grobogan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	2 Gedung	185.095.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	2 Gedung	200.000.000	Usulan OPD

1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				269.999.800						425.000.000	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Perijinan, Pengumpulan Sumbangan dan Undian	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	160 orang	35.000.000	0	0			180 orang	75.000.000	
1	06	02	2.02	01	<i>Koordinasi dan Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan, Pengumpulan Sumbangan dan Undian	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	160 orang	35.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	180 orang	75.000.000	Usulan OPD
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	99 orang	234.999.800	0	0			100 orang	350.000.000	
1	06	02	2.03	01	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	50 orang	40.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	60 orang	75.000.000	Usulan OPD
1	06	02	2.03	02	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	58 orang	10.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	60 orang	25.000.000	Usulan OPD
1	06	02	2.03	03	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Perayaan Hari jadi Kab. Grobogan dan Hari-hari besar Nasional lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	1200 orang	70.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	1300 orang	100.000.000	Usulan OPD
1	06	02	2.03	04				99 orang	114.999.800	0	0		penting	100 orang	150.000.000	Usulan OPD

					<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksannya Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan					Dana Alokasi Umum				
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				443.393.050						650.000.000	
1	06	'04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LUT dan Gelandangan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	90 orang	358.393.050	0	0			100 orang	500.000.000	
1	06	'04	2.01	03	<i>Penyediaan Alat Bantu</i>	Jumlah Disabilitas yang mendapat Bantuan Alat bantu	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	100 unit	103.393.050	0	0	Dana Alokasi Umum	<i>penting</i>	150 unit	150.000.000	<i>Usulan OPD</i>
1	06	'04	2.01	05	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	Terlaksananya Kegiatan untuk Pembinaan Keluarga Eks Tuna Sosial, Terlaksananya Penyuluhan/Pembinaan Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) dan Waria	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	90 orang	75.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	<i>penting</i>	100 orang	100.000.000	<i>Usulan OPD</i>
1	06	02	2.01	06	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Meningkatkan Pelayanan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	140 orang	180.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	<i>penting</i>	150 orang	250.000.000	<i>Usulan OPD</i>
1	06	'04	2.02					160 orang	85.000.000	0	0			150 orang	150.000.000	

					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan									
1	06	'04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan bagi Pembinaan LKSA, Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berwirausaha bagi Anak Panti/Peghuni Panti	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	120 orang	85.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	150 orang	150.000.000	Usulan OPD
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				454.999.850						600.000.000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	41162 RT	454.999.850	0	0			45000 RT	600.000.000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kube Wanita Mandiri, Update Data Fakir Miskin	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	1 paket, 3400 KK	79.999.750	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	1 paket, 4000 KK	150.000.000	Usulan OPD
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Honorarium Petugas PKHS, Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin, Terlatihnya Petugas Pengelola data Bansos Pangan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	295 orang, 41162 KK, 230 orang	375.000.100	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	300 orang, 45000 KK, 250 orang	450.000.000	Usulan OPD

1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				180.000.000						250.000.000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Kesiapsiagaan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	300 orang	180.000.000	0	0			100 orang	250.000.000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Tentang Bencana Alam/ Sosial Tersalurnya Bantuan	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	5 item	155.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	7 item	200.000.000	Usulan OPD
1	06	06	2.02	02	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Tentang Bencana Alam/ Sosial dan Terlatihnya Petugas Tagana	Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	60 orang	25.000.000	0	0	Dana Alokasi Umum	penting	100 orang	50.000.000	Usulan OPD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022 terdiri dari lima program dengan total pagu anggaran Rp 5.346.256.000,- dengan rincian sebagaimana Tabel IV.1.

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Rencana Kerja Program	Jumlah Dana	Keterangan
1.06.01.01	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.076.377.800,-	
1.06.01.02	Program Pemberdayaan Sosial	236.941.000,-	
1.06.01.04	Program Rehabilitasi Sosial	400.070.200-	
1.06.01.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	478.057.000,-	
1.06.01.06	Program Penanganan Bencana	124.810.000,-	
1.06.01.07	Program Pengelolaan Taman Pahlawan	30.000.000,-	
	Jumlah	5.346.256.000 -	

BAB V

PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, guna menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain yang berkaitan.

Purwodadi, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kab. Grobogan



EDY SANTOSO, S.Sos. MM.
NIP 19640507 198607 1 002